

**Kendala Program Zakat Community Development BAZNAS dalam
Pengentasan Kemiskinan di Nagari Balai Baiak Malai III Koto**

Haziratul Hidayati¹, Indraddin², Bob Alfiandi³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Departemen Sosiologi, Universitas Andalas,
Indonesia

¹haziratulhidayati29@gmail.com, ²indrazainudin@yahoo.com,

³bobalfiandi@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is a philanthropic instrument that plays a role in poverty alleviation, one of which is through the Zakat Community Development (ZCD) Program managed by BAZNAS. This program aims to improve community welfare through village community empowerment and has been successful in several areas. However, in Nagari Balai Baiak Malai III Koto, the ZCD program has not shown the expected results. The target group is still classified as poor families, even the poverty rate has increased after the program runs. So, this research aims to identify the obstacles faced in poverty alleviation in Nagari Balai Baiak Malai III Koto. The research method used is a qualitative method with a case study type. The results of this study found that structural, institutional, socio-cultural, and political participation weaknesses are the main factors that hinder the success of the program. To improve the effectiveness of the program, synergy between BAZNAS and local government, community capacity building, local institutional strengthening, and transparency in the management of zakat funds are needed. With a more integrated approach, the program is expected to run more sustainably and have a positive impact in alleviating poverty.

Keywords: Constraints, Philanthropy, Poverty Alleviation, Zakat Community Development

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen filantropi yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui Program Zakat Community Development (ZCD) yang dikelola BAZNAS. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komunitas desa dan telah berhasil di beberapa daerah. Namun, di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, program ZCD belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kelompok sasaran masih tergolong keluarga miskin, bahkan angka kemiskinan meningkat setelah program berjalan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan di Nagari Balai Baiak Malai III Koto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelemahan struktural, kelembagaan, sosial-budaya, dan partisipasi politik menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan program. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan sinergi antara BAZNAS dan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, program ini diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan.

Kata kunci: Filantropi, Kendala, Pengentasan Kemiskinan, Zakat Community Development

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan nasional bagi Indonesia. Secara umum, penyebab kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan alamiah akibat keterbatasan sumber daya dan teknologi yang rendah, serta kemiskinan buatan yang muncul karena ketimpangan struktur sosial dan ekonomi (Suyanto, 2013). Berbagai program telah diupayakan pemerintah, seperti pemetaan kantong kemiskinan dan penyusunan standar garis kemiskinan, namun hasilnya masih belum optimal. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, kesenjangan sosial dan ekonomi masih cukup lebar. Oleh karena itu, menurut penelitian dari (Kurniawan et al., 2023) selain program dari pemerintah, salah satu upaya alternatif yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan yaitu melalui zakat. Zakat memiliki sifat konstruktif dan berpotensi dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan (Riyadi et al., 2023).

Zakat merupakan sumber pendanaan sosial ekonomi umat Islam dan solusi alternatif yang dapat digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat. Artinya, penggunaan zakat tidak hanya terbatas pada beberapa kegiatan yang berorientasi konvensional, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti untuk program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal usaha (Riyadi et al., 2023). Pemanfaatan zakat memerlukan persiapan dan pelaksanaan yang matang, termasuk mengkaji akar penyebab kemiskinan, pengangguran dan kekurangan modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengembangan zakat oleh pengelola zakat.

Dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka eksistensi institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada pada masyarakat menjadi sangat penting (Khairinnisa, 2021). Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa BAZNAS ditunjuk sebagai pengelola dana zakat secara nasional untuk menanggulangi kemiskinan. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bertujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat. Agar mencapai tujuan tersebut BAZNAS membentuk program-program yang diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan yang ada di Indonesia (BAZNAS, 2022).

Program *Zakat Community Development* merupakan program yang dibentuk oleh BAZNAS dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif. Di mana sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Buchori, 2021). Tujuan utama ZCD adalah menggali potensi serta memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan berlandaskan prinsip pemberdayaan masyarakat (Kajian Strategis -Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial

(Ayuana Soegandi & Santoso, 2022). Sejalan dengan prinsip kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat, program ZCD mendorong pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik keuangan, teknis, alam, maupun manusia secara mandiri, tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal (Zubaedi, 2013). Dengan demikian, program ini berupaya membekali masyarakat agar mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia demi keberlanjutan kesejahteraan mereka.

Dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan program ZCD ini memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan, seperti penelitian dari Tikawati dan Lestari menemukan bahwa setelah adanya program ZCD di wilayah Loa Kumba terjadi peningkatan persentase penduduk yang sejahtera sebesar 50% penduduk yang mana tadinya pengangguran menjadi memiliki pekerjaan (Tikawati & Lestari, 2019). Selanjutnya penelitian dari Bambang Kurniawan, dkk, menemukan bahwa setelah adanya program ZCD di Desa Lubuk Bangkar persentase angka kemiskinan menjadi menurun yaitu dari 83.92% dari jumlah penduduk 1.200 jiwa dan jumlah pengangguran juga ikut berkurang dari awalnya 360 jiwa menjadi 183 jiwa. Serta meningkatnya kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan terciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat (Kurniawan et al., 2023). Akan tetapi dibalik keberhasilan program di beberapa daerah, tidak dapat dipungkiri ada juga program ZCD yang tidak optimal atau tidak semua implementasi program ZCD berjalan sukses.

Salah satu daerah penerima program ZCD adalah Nagari Balai Baiak Malai III Koto, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 2.508 jiwa dari 699 KK dan berstatus sebagai nagari terbelakang atau berkembang. Program ZCD di daerah ini telah berjalan sejak Desember 2019 dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, bantuan pipanisasi, pembangunan MCK, serta kegiatan dakwah. Akan tetapi, meskipun program ini telah berlangsung hampir lima tahun, angka kemiskinan justru mengalami peningkatan. Adapun jumlah angka penduduk miskin di Nagari Balai Baiak Malai III Koto bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Nagari Balai Baiak Malai III Koto 2019-2024

Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Nagari Balai Baiak Malai III Koto

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	Persentase (%)
1.	2019	1.688	475	118	24.84
2.	2020	2.148	606	234	38.61
3.	2021	2.287	659	517	78.45
4.	2022	2.184	625	239	38.24
5.	2023	2.619	816	383	46.93
6.	2024	2.941	699	409	58.51

Data menunjukkan bahwa persentase keluarga miskin di Nagari Balai Baiak Malai III Koto mencapai 78,45% pada tahun 2021, mengalami penurunan pada 2022, namun kembali meningkat hingga 58,51% pada tahun 2024. Mekanisme pelaksanaan program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto mencakup tiga tahapan utama, yakni pembentukan kegiatan program berbasis pemberdayaan, pendampingan intensif terhadap kelompok usaha mustahik, serta pemberian bantuan modal usaha guna mendukung keberlangsungan ekonomi lokal. Program ZCD ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga miskin melalui strategi yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan program dan jumlah bantuan serta penerima manfaat program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Penerima Manfaat Program Zakat *Community Development* di Nagari Balai Baiak Malai III Koto

Sumber: Wawancara dengan Sahabat ZCD Nagari Balai Baiak Malai III Koto

No	Tahun	Nama Kegiatan	Jumlah Dana Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat	Keberlanjutan
1.	2019	Kelompok Usaha Keripik Pisang	Rp 47.954.000	15	Tidak berlanjut
2.	2020	Kelompok Usaha Nata De Coco	Rp 36.446.000	15	Masih berlanjut
3.	2021	Kelompok Tepung Jagung	Rp 52.420.000	15	Tidak berlanjut

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa, program ZCD masuk ke Nagari Balai Baiak Malai III Koto mulai tahun 2019 secara resmi menjadi nagari dampingan BAZNAS. Project pertama yang dibentuk, yaitu kelompok usaha keripik pisang dengan modal Rp 47.954.000 dalam bentuk alat/mesin dan bahan-bahan untuk produksi keripik pisang yang diberikan pada 15 penerima manfaat, diketahui bahwa *project* ini tahun 2021 berhenti produksi, disebabkan oleh kurangnya bahan pokok dalam pembuatan keripik pisang sehingga *project* ini tidak berlanjut.

Pertengahan tahun 2020 program ZCD membentuk *project* kedua, yaitu kelompok usaha nata de coco dengan jumlah modal yang sama dan jumlah penerima manfaat 15 orang, kelompok ini masih terus berlanjut sampai sekarang walaupun pada tahun 2023 tidak produk, namun di 2024 mulai produksi kembali dan mengalami penurunan jumlah anggota dari 15 orang menjadi 10 orang. Pada tahun 2021 program ZCD membentuk *project* ketiga di Nagari Balai Baiak yaitu kelompok usaha tepung jagung dengan penerima manfaat sejumlah 15 orang. Akan tetapi kelompok ini tidak jadi disalurkan dana bantuan, disebabkan terjadi ketidaksesuaian kelompok usaha yang akan dibuat dengan potensi alam di daerah tersebut sehingga

membuat kelompok tepung jagung ini tidak berlanjut, walaupun sebelumnya sudah dibentuk kelompoknya.

Dari ketiga kelompok usaha yang dibentuk program ZCD ini seharusnya mendapatkan pendampingan selama tiga tahun masing-masing kelompok guna membantu penerima manfaat dalam mengembangkan dan mengelola usahanya, agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga program ini bisa mencapai tujuannya dalam membangun ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, faktanya hampir lima tahun program ZCD ini berjalan, angka kemiskinan bukannya menurun, melainkan meningkat dan tidak satu pun dari tiga kelompok tersebut mendapatkan yang mendapatkan pendampingan penuh selama tiga tahun, disebabkan munculnya wabah virus Corona tahun 2020 serta tidak sesuainya potensi daerah dengan kegiatan yang dilakukan sehingga kegiatan dihentikan. Permasalahan tersebut selaras dengan hasil penelitian dari Agastya, dkk yang menyatakan bahwa identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang komprehensif sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan (Maitra Agastya et al., 2018).

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berfokus mengungkap kendala yang dihadapi program Zakat Community Development sebagai program pengentasan kemiskinan dari BAZNAS yang berlokasi di Nagari Balai Baiak Malai III Koto. Meskipun sebelumnya sudah beragam kajian tentang pengentasan kemiskinan melalui Zakat Community Development, antara lain : *pertama*, penelitian dari Bambang Kurniawan, dkk (2023) yang meneliti tentang peran ZCD upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran ZCD dalam perspektif ekonomi islam. *Kedua*, penelitian dari Zaky Ramadhan (2016) tentang perbandingan pelaksanaan program ZCD BAZNAS di wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. *Ketiga*, penelitian dari Holiq Prasetyo (2023) tentang upaya pencapaian keberhasilan program ZCD serta dampaknya dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Keempat, penelitian dari Tikawati (2019) tentang penyebab dipilihnya wilayah Loa Kumbar sebagai penerima ZCD dan dampak setelah dilaksanakannya program ZCD. Kelima, Agus Riyadi, dkk (2023) tentang pendayagunaan dana zakat dalam program ZCD dan melihat perubahan kehidupan masyarakat setelah menerima program ZCD.

Dari studi literatur yang telah dilakukan sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi dan dampak program ZCD dalam pengentasan kemiskinan. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini, terutama dari perspektif BAZNAS sebagai pengelola utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto. Teori sosiologi yang digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini yaitu teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife.

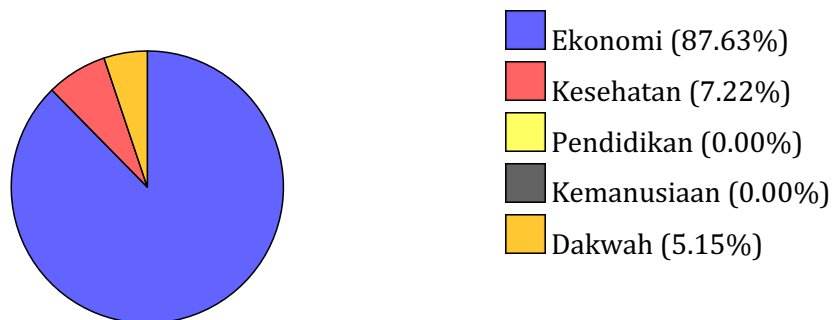
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk menjelaskan lebih mendalam

terkait kendala dalam pelaksanaan program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, Kab. Padang Pariaman dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Kemudian menganalisis dan menginterpretasi data menggunakan analisis data Miles dan Huberman dengan menemukan tema-tema dari hasil penelitian, lalu dilakukan penyajian data dalam bentuk matriks, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Padang Pariaman, arsip dokumen dari Nagari Balai Baiak Malai III Koto, arsip BAZNAS Padang Pariaman dan BAZNAS RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Zakat Community Development (ZCD) yang diinisiasi oleh BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan berbasis zakat. Pendampingan program ZCD BAZNAS ini berdasarkan 5 pilar yang diusung yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah hanya tiga pilar yang diimplementasikan dalam program ZCD BAZNAS di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, yaitu pilar ekonomi, kesehatan dan dakwah. Gambar 1. berikut terlihat persentase kegiatan ZCD yang sudah diimplementasikan.



Gambar 1. Diagram Implementasi Program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto

Sumber: BAZNAS RI, 2025

Dari pilar ekonomi yang diimplementasikan di Nagari Balai Baiak Malai III Koto yaitu pendampingan pengolahan keripik pisang, Pendampingan Pengolahan Air Kelapa Menjadi Nata De Coco, Pendampingan Manajemen dan Keuangan Kelompok. Akan tetapi semua pendampingan kelompok yang diberikan sudah tidak berlanjut.

- **Pendampingan pengolahan keripik pisang**

Pendampingan pengolahan keripik pisang melalui program ZCD BAZNAS berikan kepada kelompok usaha keripik pisang Restu Bundo Kandung yang beralamat di Korong Mudiak Aia Nagari Balai Baiak Malai III Koto. Model yang diterapkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan adanya sistem mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dengan cara memberikan pelatihan produksi olahan keripik pisang yang tepat guna bagi penerima manfaat.

Kelompok keripik pisang ini beranggotakan 15 orang ibu-ibu rumah tangga dan ibu lansia (Mustahik) yang tidak mampu untuk menjadi buruh tani dan hanya beraktivitas di rumah. Adapun penyaluran dana zakat yang diberikan kepada kelompok ini sejumlah Rp 47.954.000 dalam bentuk peralatan dan bahan. Peralatan berupa kompor, wajan, mesin dan lainnya, lalu bahan-bahan seperti bahan bakunya pisang, bumbu perisa dan lainnya. Untuk ketersediaan bahan baku, itu dibeli kepada masyarakat sekitar nagari dengan harga beli sesuai dengan pembelian yang dilakukan oleh para tengkulak.

Pendampingan terhadap kelompok usaha keripik pisang ini dilakukan dua minggu sekali dan hanya berlangsung selama 1 tahun di mulai pada tahun 2019. Adapun mekanisme pendampingan dimulai dari *trial* peralatan yang sudah diberikan seperti kompor dan lainnya, lalu mengadakan rapat untuk memastikan rantai pemasok bahan baku pisang yang diadakan satu kali. Kemudian pendamping mendemonstrasikan pembuatan produk dan contoh produk yang akan dibuat, lalu kelompok mencoba mengolah sendiri, dilanjutkan proses *packing* yang mana sebelumnya pendamping membantu mendesain stiker yang akan digunakan pada kemasan keripik pisang. Setelah itu, hasil dari produksi untuk uji coba diberikan ke BAZNAS kab. Padang Pariaman dan ke Kantor Walinagari. Untuk pemasaran dilakukan oleh kelompok dan pendamping.

Selama dilakukannya pendampingan terlihat perkembangan dari masyarakat, seperti mampu melakukan administrasi dan pencatatan kelompok yang mana sebelumnya belum bisa, mampu memasarkan produk keluar nagari/desa dan mampu mengatur jadwal produksi dan pembagian jadwal anggota untuk melakukan produksi serta tugas masing-masing. Akan tetapi saat penjualan hasil produksi keripik pisang hanya mampu mencapai Rp 200.000- Rp 600.000/bulan sehingga seiring berjalannya program penjualannya bukannya meningkat melainkan menurun sehingga hal ini menyebabkan masyarakat kurang termotivasi untuk ikut terus menjalankan usaha ini dan satu persatu anggota kelompok mulai mengundurkan diri. Setelah tidak adanya pendampingan dari pendamping / sahabat ZCD kelompok keripik pisang ini sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2021.

- **Pendampingan Pengolahan Air Kelapa Menjadi Nata De Coco**

Nagari Balai Baiak merupakan salah satu lokasi Zakat Community Development BAZNAS dengan salah satu olahan dari kelapa yaitu Nata de Coco yang sudah berjalan produksi sejak Desember 2020. Pendampingan mulai dilakukan pada 2020 sampai awal tahun 2022. Kelompok ini memberdayakan 15 orang ibu-ibu penerima manfaat dengan dana ZCD yang disalurkan sebesar Rp 36.446.000 yang berupa mesin pemotong nata, peralatan lainnya dan bahan-bahan pembuat nata de coco. Pengolahan Nata de Coco tergolong pengolahan dengan sanitasi dan sterilitas yang cukup tinggi sehingga dalam pengolahannya kelompok penerima manfaat menerapkan cara produksi pangan yang baik, dan untuk pemasarannya memakai merek BAYCOCO (Balai Baiak Nata de Coco).

Pendampingan kelompok nata de coco ini dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu dengan dampingan dari satu orang sahabat ZCD. Pendampingan

terhadap kelompok nata de coco ini hanya berlangsung selama 14 bulan. Mekanisme pendampingan dimulai dengan rapat untuk memastikan pemasok bahan baku, selanjutnya dilakukan sosialisasi produk yang akan dibuat, lalu pendamping mendemonstrasikan pembuatan nata de coco. Setelah itu, kelompok mencoba membuat nata de coco dengan pantauan dari pendamping, kemudian dikemas dan diberi stiker pada kemasan. Untuk pemasaran dilakukan oleh kelompok dan pendamping. Pendamping juga mencoba menjalin jaringan dengan pemilik usaha kopra putih di Nagari Balai Baik Malai III Koto guna mendapatkan pasokan air kelapa, akan tetapi usaha tersebut gagal. Dalam usaha mengembangkan pemasaran produk nata de coco dan peningkatan kualitas produksi, pendamping ikut dalam berbagai pertemuan maupun pelatihan seperti, pertemuan dengan asosiasi Akumandiri dan Pemko Padang membahas pemasaran produk UMKM diadakan satu kali, pelatihan bersama balai pertanian Jambi, menjalin kerja sama dengan Ta Bumrag kab. Padang Pariaman, Ta Bumrag Sumatera Barat dan penggiat pemberdayaan KKI Warsi, berdiskusi bersama Bpom terkait tata cara produksi pangan yang baik, pelatihan foto produk bersama *Tenant* Inbistek Unand dan pertemuan bersama Bank Nagari untuk pembentukan ekosistem usaha.

Selama pendampingan terlihat perkembangan dari penerima manfaat dari yang awal tidak bisa mengolah air kelapa menjadi bisa dan juga mampu membuat pembukuan keuangan kelompok atau administrasi sederhana. Untuk perkembangan kelompok usaha sendiri pada tahun 2021 periode Januari - Juni hanya mampu mencapai omzet Rp 1.518.000 dengan *profit* Rp 834.000, sedangkan periode Juli - Desember 2021 mengalami penurunan omzet hanya sebesar Rp 755.000 dengan profit Rp 394.000. Pada tahun 2022 kelompok ini terus mengalami penurunan omzet yang dikarenakan kesulitan dalam pemasaran dan di tahun tersebut juga tidak ada lagi pendamping di lapangan. Oleh karena itu, pada tahun 2023 kelompok ini memutuskan untuk berhenti produksi sementara dan pada tahun 2024 mencoba melanjutkan produksi namun gagal disebabkan bibit nata yang sudah tidak bisa digunakan lagi.

- **Pendampingan Manajemen dan Keuangan Kelompok**

Pendampingan manajemen dan keuangan kelompok ini dilakukan langsung oleh pendamping lapangan atau sahabat ZCD ke kelompok usaha nata de coco maupun keripik pisang. Di mana sebelumnya pendamping ini telah diberikan pelatihan seperti pelatihan dari *Tenant* Inkubasi Bisnis Dan Teknologi Unand. Setelah pendampingan mengikuti pelatihan kemudian akan diajarkan kepada kelompok seperti apa cara pembuatan laporan keuangan kelompok.

Jadi dalam program pemberdayaan ZCD ini tidak hanya memberikan pendampingan keterampilan tapi juga pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan kelompok dan manajemen keuangan usaha. Sebagaimana dijelas Jim Ife strategi pemberdayaan terdapat tiga, salah satunya melalui pendidikan dan penyadaran-tahunan yang dilakukan dengan memasukkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kekuatan mereka sehingga tercapai tujuan program pemberdayaan.

Di samping memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program ZCD BAZNAS di Nagari Balai Baiak Malai III Koto juga memberikan dukungan berupa pengadaan air bersih dengan membuat *spot* pompa air (pipanisasi) dan MCK sebagai solusi dalam mengatasi salah satu masalah di Nagari Balai Baiak Malai III Koto yang mana kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Pengadaan air bersih ini juga bertujuan untuk memudahkan kelompok usaha yang telah dibentuk dalam melakukan produksi. Dana ZCD yang disalurkan untuk mengatasi permasalahan air bersih dengan memuat *spot* pompa air dan jaringan pipa sebesar Rp 146.410.000. sedangkan untuk pembangunan MCK dibantu dana CSR PT Henan Putihrai yang bekerja sama dengan BAZNAS sebesar Rp 100.000.000 untuk 4 unit MCK di Nagari Balai Baiak Malai III Koto.

Dari sisi keagamaan yaitu kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah dari program ZCD ini diberikan kepada anak-anak dari ibu-ibu penerima manfaat kelompok usaha keripik pisang dan nata de coco. Kegiatan dakwah ini berupa pengembangan TPQ untuk anak-anak serta masyarakat yang ingin belajar di TPQ tersebut. Dalam pengembangan TPQ ini BAZNAS menyalurkan dana ZCD sebesar Rp 41.220.000 untuk gaji insentor guru di TPQ tersebut yang dibayarkan per bulan sebesar Rp 3.170.769 /bulan. Selain itu, kegiatan dakwah dari program ZCD ini juga ada seperti acara peringatan maulud nabi, isra' Mi'raj, Nuzul Quran dan acara keagamaan lainnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaan ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, terdapat berbagai kendala yang dapat dianalisis menggunakan perspektif teori pemberdayaan Jim Ife. Jim Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan tidak hanya sebatas aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelembagaan, politik, dan kultural yang saling berkaitan. Berdasarkan teori tersebut, kendala dalam pelaksanaan program ZCD dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Kendala Struktural

Kendala struktural merujuk pada hambatan yang bersumber dari sistem, infrastruktur, dan kebijakan yang tidak mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program ZCD BAZNAS secara efektif. Kendala ini mencerminkan keterbatasan yang muncul akibat faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung masyarakat, tetapi sangat mempengaruhi kapasitas mereka dalam mengembangkan kemandirian. Dari hasil penelitian menemukan beberapa kendala struktural yang terjadi dalam program ZCD BAZNAS di Nagari Balai Baiak Malai III Koto meliputi:

- a. Tidak memadainya fasilitas nagari, seperti akses jalan yang sulit di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, terbatasnya layanan air bersih, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti perbankan, pasar dan lain-lain. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi hasil usaha, sehingga membatasi peluang mereka dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- b. Ketidakefahaman antara pendamping lapangan dan BAZNAS kabupaten, yang mengindikasikan lemahnya koordinasi dan sistem komunikasi dalam

pelaksanaan program. Di mana dalam pendamping lapangan ini ditunjuk langsung oleh BAZNAS RI yang mana seharusnya atas persetujuan dari BAZNAS Kabupaten, akan tetapi faktanya ditemukan bahwa BAZNAS Kabupaten kurang setuju atas penetapan pendamping lapangan ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto. Hal tersebut menyebabkan ketidaksepahaman antara pendamping lapangan dengan BAZNAS Kabupaten terhadap lama masa pendampingan penerima manfaat di lapangan. Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan bahwa program ZCD di Nagari Balai Baiak bersifat multi-year atau tanpa batasan waktu, sedangkan dari pendamping menyatakan bahwa lama pendampingan dalam program ZCD hanya berlangsung selama tiga tahun. Sejalan dengan penelitian dari (Muslim, 2017) penyebab utama kegagalan membangun kemandirian masyarakat miskin terletak pada koordinasi antar pelaku, kinerja fasilitator dan kesalahan *stakeholders* dalam memahami tujuan program. Kinerja organisasi dan fasilitator terlihat dari ketersediaan melaksanakan program sesuai prosedur yang digariskan, bahkan mereka bekerja secara pragmatis dengan mengedepankan hasil dari pada proses. Dengan demikian menyebabkan lemahnya koordinasi antara pendamping lapangan dengan BAZNAS kabupaten dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka.

- c. Perubahan rencana di tengah jalan, yang menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi program dan menghambat keberlanjutan usaha yang telah dirintis. Di mana pada saat perencanaan akan dibentuk tiga kelompok usaha, yaitu kelompok keripik pisang, nata de coco dan tepung jagung. Akan tetapi, untuk kelompok tepung jagung gagal diimplementasikan disebabkan oleh dua kelompok sebelumnya kurang menampakkan hasil yang disignifikan sehingga dana ZCD untuk kelompok ini gagal disalurkan. Selain itu, ditambah dengan sulitnya mendapatkan bahan baku yaitu jagung membuat kelompok tepung jagung ini gagal diimplementasikan.

Berdasarkan peneliti sebelumnya juga menemukan kendala struktural dalam program pemberdayaan terhadap suatu komunitas, di mana kendala yang dihadapi mulai dari infrastruktur dari daerah pemberdayaan yang tidak bisa dimasuki angkutan umum. Selanjutnya lokasi yang jauh dari akses transportasi, fasilitas pendidikan, kesehatan akibat biaya yang mahal. Terakhir, tidak adanya kejelasan program pemberdayaan komunitas ini sehingga belum menyentuh persoalan utama (Lede Bili & Nugroho E.W, 2023). Dari hasil penelitian yang terdapat temuan baru ternyata salah satunya kendalanya yaitu lemahnya koordinasi antar agen pelaksana program, hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan program pemberdayaan. Menurut Ife, pemberdayaan yang ideal harus didukung oleh sistem yang inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Kendala struktural yang tidak diatasi dapat menghambat efektivitas pemberdayaan karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dan sistem yang mendukung kemandirian mereka.

2. Kendala Personal

Aspek personal *empowerment* dalam teori Jim Ife menekankan pada kemampuan individu dalam mengembangkan potensi diri dan keterampilan untuk mencapai kemandirian. Kendala dalam aspek ini meliputi:

a. Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak penerima manfaat program yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek literasi keuangan, manajemen usaha, dan keterampilan produksi. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan masyarakat di Nagari Balai Baiak Malai III Koto sehingga terbatasnya pengetahuan mereka terhadap pengelolaan usaha dan keterampilan. Selain itu, juga disebabkan oleh anggota kelompok usaha atau penerima manfaat yang berasal dari kalangan ibu-ibu dan ibu lansia. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap fasilitator atau pendamping program, sehingga sulit bagi mereka untuk berkembang secara mandiri.

b. Mentalitas ketergantungan

Beberapa kelompok masyarakat masih memiliki pola pikir ketergantungan terhadap bantuan, baik dari pemerintah maupun lembaga filantropi seperti BAZNAS. Akibatnya, mereka kurang memiliki inisiatif dalam mengembangkan usaha secara mandiri dan cenderung menunggu bantuan selanjutnya. Hal tersebut mengakibatkan kelompok usaha yang sebelumnya didampingi ketika ditinggal oleh pendamping lapangan mereka berhenti menjalankan usahanya. Masalah ini juga disebabkan oleh cara pendamping dalam mendampingi kelompok, di mana berdasarkan hasil temuan di lapangan ditemukan bahwa mulai dari peralatan, bahan-bahan untuk produksi sampai pemasaran dibantu oleh pendamping. Bahkan untuk membeli kembali bahan-bahan yang kurang kelompok usaha ini tidak mengetahui tempat belinya. Dengan artian pemberdayaan kelompok usaha yang dibentuk dari program ZCD BAZNAS ini belum mampu memperkuat kelembagaan lokal sehingga ketika ditinggal mereka belum mampu menjalankan usahanya sendiri. Dengan demikian, terdapat indikasi ketergantungan pada pendamping dalam pemberdayaan kelompok usaha ini. Sebagaimana penelitian terdahulu dari (Tri & Utomo, 2016) ketergantungan ini muncul dari kurang dilibatkannya masyarakat atau kelompok dalam perencanaan dan implementasi program seiring dengan paradigma pembangunan yang bertumpu dan berorientasi pada masyarakat dan masyarakat harus diakui dan ditempatkan sebagai elemen kunci dalam perumusan program. Jika tidak demikian akan menyebabkan kurangnya rasa memiliki antara masyarakat dengan program yang dijalankan

Menurut Ife, pemberdayaan personal sangat penting dalam menciptakan individu yang percaya diri, mandiri, dan memiliki kontrol atas kehidupannya. Untuk mengatasi kendala ini, program pemberdayaan harus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha mereka sendiri.

3. Kendala Kelembagaan

Kendala kelembagaan dalam teori pemberdayaan Jim Ife merujuk pada hambatan yang muncul akibat kelemahan dalam sistem organisasi, struktur sosial, serta kapasitas lembaga lokal yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Kendala ini terjadi ketika institusi yang bertanggung jawab atas pemberdayaan tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan keberlanjutan program dan keterlibatan masyarakat secara optimal. Kelembagaan yang kuat merupakan syarat utama dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan. Namun, Program ZCD mengalami beberapa kendala kelembagaan, seperti:

- a. Ketidaksihesuaian antara rencana pendampingan dan implementasi di lapangan, di mana pendampingan yang seharusnya dilakukan lima kali seminggu hanya terealisasi dua hingga tiga kali. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan pelatihan dan bimbingan yang cukup untuk menjalankan usaha secara mandiri. Jim Ife menekankan bahwa konsistensi dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen krusial. Ketika frekuensi pendampingan tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka proses transfer pengetahuan dan keterampilan menjadi tidak optimal. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya penguatan kapasitas masyarakat, sehingga mereka cenderung tetap bergantung pada bantuan eksternal atau pendamping. Ketergantungan ini bertentangan dengan prinsip dasar pemberdayaan yang bertujuan untuk mendorong kemandirian komunitas. Lebih lanjut, ketidaksihesuaian antara rencana dan pelaksanaan mencerminkan kurangnya fleksibilitas dalam perencanaan program. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan secara komprehensif dinamika dan kendala di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, logistik, atau kondisi geografis, cenderung mengalami hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap perencanaan awal agar lebih adaptif terhadap realitas sosial dan operasional di lapangan, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
- b. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan program, di mana dana untuk kelompok tepung jagung tetap dicantumkan dalam proposal akhir program meskipun tidak terealisasi. Menurut (Setianingsih et al., 2022) transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat serta memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan program tersebut sehingga akan menghasilkan perbaikan dan perubahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Transparansi menyediakan dasar bagi mekanisme partisipatif, di mana masyarakat dapat ikut memonitor, mengevaluasi, dan memberikan masukan atas pelaksanaan program. Jika informasi yang disajikan tidak akurat atau tidak diperbaharui secara jujur, maka mekanisme partisipasi tersebut tidak berjalan dengan efektif. Menurut Jim Ife, partisipasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk membangun kapasitas lokal, memperkuat jaringan, dan memastikan bahwa program memiliki dampak positif jangka panjang.

- c. Kurangnya transparansi antara pendamping lapangan dengan penerima manfaat, di mana semua peralatan dan bahan usaha dibeli langsung oleh pendamping tanpa melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Akibatnya, masyarakat hanya menerima hasil akhir tanpa mengetahui jumlah dana zakat yang disalurkan dan bagaimana pengelolaannya. Salah satu tujuan utama pemberdayaan menurut Ife adalah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Dengan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan dan pengelolaan dana, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar mengenai mekanisme pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Akibatnya, ketergantungan pada pendamping berlanjut dan kapasitas lokal untuk maju secara mandiri terhambat.

Dalam perspektif Ife, kelembagaan yang lemah akan menghambat keberlanjutan program dan menciptakan ketergantungan pada pihak luar. Program pemberdayaan yang ideal harus mampu menciptakan komunitas yang mampu mengelola sendiri sumber daya dan infrastruktur yang telah dibangun.

4. Kendala Sosial dan Kultural

Kendala sosial dan budaya dalam teori pemberdayaan Jim Ife merujuk pada hambatan yang muncul akibat norma, kebiasaan, pola pikir, dan nilai-nilai sosial yang dapat menghambat proses pemberdayaan masyarakat. Kendala ini sering kali berasal dari tradisi yang sudah lama tertanam dalam masyarakat dan sulit diubah dalam waktu singkat. Dalam Program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, beberapa kendala sosial dan budaya yang terjadi meliputi:

- a. Budaya merantau, ini menjadi salah satu budaya yang sudah tertanam lama di masyarakat Minang Kabau, hal ini juga terjadi Nagari Balai Baiak Malai III Koto yang menyebabkan di mana banyak penduduk usia produktif lebih memilih bekerja di luar daerah, sehingga tenaga kerja lokal yang dapat menjalankan program pemberdayaan menjadi terbatas.
- b. Sikap cepat puas, ini menjadi salah satu kendala dari sisi pembuat program yaitu BAZNAS. Mentalitas merasa cukup yang sering ditemukan di kalangan masyarakat miskin menjadi penghambat dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Jim Ife menekankan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal memberikan akses ekonomi, tetapi juga mengubah pola pikir agar masyarakat mau berkembang dan tidak hanya bertahan dengan kondisi yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan taraf hidupnya karena mereka merasa kondisi saat ini sudah cukup. Pola pikir ini menyebabkan rendahnya motivasi untuk mengikuti pelatihan, mengadopsi inovasi baru, atau memperluas usaha yang telah diberikan dalam program. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa banyak penerima manfaat yang pasif dan tidak berinisiatif dalam mengembangkan usaha, karena mereka menganggap program ini sebagai bentuk bantuan sosial, bukan program pemberdayaan yang menuntut partisipasi aktif.

Menurut Jim Ife, pemberdayaan yang efektif harus menghormati dan mempertimbangkan aspek sosial serta budaya yang melekat dalam komunitas. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus dirancang agar sesuai dengan nilai dan kebiasaan lokal, sekaligus mendorong perubahan sosial yang bertahap menuju kemandirian.

5. Kendala Politik dan Partisipasi

Political empowerment dalam teori Jim Ife mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Kendala dalam aspek ini meliputi:

a. Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Program

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program masih terbatas, sehingga implementasi program sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Menurut Ife, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program sangat krusial agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan, sering kali terjadi dislokasi antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan riil di lapangan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program tersebut. Ife mendorong pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung, di mana mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menentukan prioritas dan strategi. Hal ini mencakup praktik dialog yang inklusif, penguatan kapasitas komunitas untuk menyuarakan aspirasi mereka, serta membangun rasa memiliki terhadap program yang direncanakan. Minimnya partisipasi kelompok sasaran dalam perencanaan program akan berdampak juga pada kurangnya rasa kepemilikan terhadap program sehingga masyarakat cenderung merasa program tersebut dipaksakan dari luar dan partisipasi dalam tahap implementasi dan pemeliharaan akan menjadi rendah.

b. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah

Meskipun program ZCD telah berjalan di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, sinergi antara BAZNAS dan pemerintah daerah masih belum optimal. Kurangnya dukungan dalam bentuk kebijakan atau fasilitasi infrastruktur menjadi tantangan dalam keberlanjutan program. Penelitian dari (Putri Rahminda et al., 2024) menjelaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan salah satunya disebabkan oleh peran dan dukungan dari pemerintah daerah atau lokal melalui kebijakan, bantuan keuangan dan pendampingan lanjutan. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian Nagari Balai Baiak Malai III Koto berstatus sebagai nagari berkembang dan nagari ini juga mempunyai program-program pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan, sehingga menyebabkan kurangnya dukungan terhadap program ZCD BAZNAS di nagari ini karena mereka lebih fokus pada program dari nagari. Dengan demikian, ini menjadi salah satu penyebab program ZCD di nagari ini tidak berkelanjutan.

Dalam perspektif teori pemberdayaan Jim Ife, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada faktor struktural, personal, kelembagaan, sosial-kultural, dan politik. Kendala yang dihadapi dalam implementasi program ZCD di Nagari Balai Baiak Malai III Koto menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan holistik yang melibatkan semua aspek tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi kendala yang ada, seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta perubahan paradigma dalam partisipasi masyarakat agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berbasis zakat. Di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, program ini berfokus pada ekonomi, kesehatan, dan dakwah, namun menghadapi berbagai kendala tidak hanya kendala dari sisi organisasi pembuat program tapi juga terdapat kendala dari sisi penerima manfaat atau masyarakat. Secara struktural, keterbatasan infrastruktur, lemahnya koordinasi, dan perubahan rencana menghambat pelaksanaan. Dari sisi personal, rendahnya kapasitas SDM dan mentalitas ketergantungan memperlambat kemandirian. Kendala kelembagaan muncul dari lemahnya struktur organisasi dan transparansi dalam pengelolaan dana. Faktor sosial dan budaya, seperti budaya merantau dan sikap cepat puas, juga memengaruhi keberlanjutan usaha. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta kurangnya dukungan pemerintah daerah turut menjadi hambatan.

Untuk meningkatkan efektivitas program ZCD, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara BAZNAS RI dan kabupaten serta dukungan pemerintah daerah dalam infrastruktur dan kebijakan. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan partisipasi aktif harus diperkuat agar lebih mandiri. Penguatan kelembagaan lokal dan transparansi pengelolaan dana juga penting untuk keberlanjutan program. Selain itu, program harus menyesuaikan dengan budaya setempat serta melibatkan tokoh masyarakat guna mendorong perubahan pola pikir menuju kemandirian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuana Soegandi, D., & Santoso, T. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BUMDES WAGE (Studi di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Negara*.
- BAZNAS. (2022). *Profil BAZNAS*. Baznas.Go.Id.
- Buchori, D. dan N. P. P. (2021). Pengaruh Program Zakat Community Development (ZCD) Baznas Kabupaten Berau Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik di Kampung Pegat Batumbuk. *Jurnal Stie Muhammadiyah Tanjung Redeb*, 5(2).

- Kajian Strategis -Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *LAPORAN KONTRIBUSI DANA ZAKAT TERHADAP PENCAPAIAN SDGs TAHUN 2023 Studi Kasus: BAZNAS RI Kata Pengantar Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL: Penyusun: Penyunting: Penerbit. www.baznas.go.id;*
- Khairinnisa, N. (2021). *Pengelolaan Zakat Community Development (ZCD) oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah*. Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kurniawan, B., Awal Habibah, G., Sulis Handayani, dan, & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). Peran Zakat Community Development (ZCD) Baznas Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lubuk Bangkar Jambi. In *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* (Vol. 7, Issue 2).
- Lede Bili, M. N., & Nugroho E.W, T. (2023). Kendala Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 7(1), 58–67. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v7i1.316>
- Maitra Agastya, N. L. P., Viciawati Machdum, S., & Hati, G. (2018). ELEMEN-ELEMEN PENDUKUNG PROSES ASESMEN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN KONDUSIF BAGI ANAK. *Sosio Konsepsia*, 8(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1458>
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/14524>
- Putri Rahminda, Solfema Solfema, & Lili Dasa Putri. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Budaya Lokal dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 209–215. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1199>
- Riyadi, A., Ningrum, W. D., & Hamid, N. (2023). PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALAI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT BAZNAS KABUPATEN KENDAL. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v7i2.1093>
- Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K., & Putranti, E. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat. *Owner*, 6(4), 3860–3869. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127>
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. In-Trans Publishing.
- Tikawati, T., & Lestari, E. D. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 9 (2025) 2514 - 2530 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i9.8141

Tri, O. :, & Utomo, W. W. (2016). Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Stiala Bandung*.
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/187/135>

Zubaedi. (2013). *PENGEMBANGAN MASYARAKAT*. Jakarta: Kencana pranada media group.